

DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA EKONOMI TERHADAP INDIKATOR PEMBANGUNAN DI PULAU PAPUA

Ilma Ainun Fitriana¹, Neli Agustina²

¹BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

²Politeknik Statistika STIS

E-mail: ¹ilma.ainun@bps.go.id, ²neli@stis.ac.id

Abstrak

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, pengembangan potensi daerah, meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keadaan tersebut tidak berlaku di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Keadaan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan belanja modal diatas rata-rata dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun indikator pembangunan daerah masih jauh dari indikator pembangunan secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi terhadap indikator pembangunan daerah. Dengan menggunakan analisis *Partial Least Square-Structural Equation Modelling* (PLS-SEM), hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi serta terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi terhadap indikator pembangunan.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, kinerja ekonomi, indikator pembangunan, PLS-SEM

Abstract

The implementation of fiscal decentralization is expected to accelerate public services, develop regional potentials, improve the economy and improve people's welfare. However, this situation does not apply to every province in Indonesia. The condition in Papua and West Papua Provinces having capital expenditure above average and high economic growth rates, but indicators of regional development are still in concern. This study aims to determine the relationship between fiscal decentralization and economic performance towards indicators of regional development. By using Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) analysis, the results show that there is a positive relationship between fiscal decentralization on economic performance. In addition, there is also a positive relationship between fiscal decentralization and economic performance on development indicators.

Keywords: *fiscal decentralization, economic performance, development indicators, PLS-SEM*

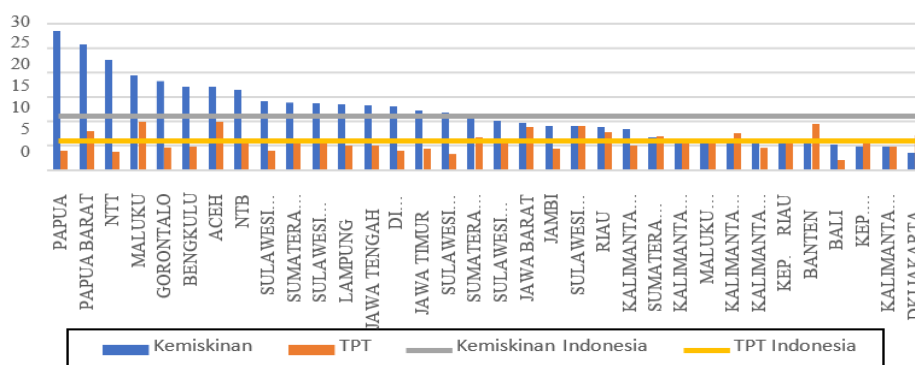
PENDAHULUAN

Sebelum reformasi, pemerintahan di Indonesia menganut sistem sentralisasi dimana pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur pemerintah daerah. Adanya sistem sentralisasi mengakibatkan adanya kesenjangan antar daerah. Pembangunan perekonomian di Pulau Jawa lebih berkembang pesat dibandingkan di pulau lainnya. Adanya kesenjangan antar daerah pada masa sebelumnya, maka dilakukan perubahan kebijakan pada masa reformasi yaitu adanya peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Sistem ini berlaku setelah adanya pengesahan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Undang-undang tersebut mengalami revisi yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan di daerahnya (UU No. 33 Tahun 2004). Dengan kebijakan ini pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mempercepat

pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan keaktifan dari masyarakat daerah, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan partisipatif. Selain itu, dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan adanya kestabilan makroekonomi dan dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah (Bird dan Vaillancourt, 1998).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal berkaitan erat dengan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD. Pada kurun waktu 2010-2016 alokasi APBN yang diberikan ke daerah, cenderung mengalami peningkatan. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dan DAU yang diterima daerah mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016. Selain itu, keadaan perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2010 hingga 2016 mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 telah mencapai Rp. 9,34 triliun. Peningkatan PDB juga diikuti dengan indikator pembangunan yang semakin baik, ditunjukkan pada Gambar 1 adanya penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan pada level nasional. Selain itu juga terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan secara nasional.



Sumber: BPS diolah

Gambar 1. Persentase kemiskinan dan pengangguran provinsi di Indonesia tahun 2015

Secara umum, pelaksanaan desentralisasi fiskal mampu meningkatkan perekonomian di daerah, namun pembangunan setiap daerah memiliki hasil yang belum optimal. Terdapat beberapa provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi serta rendahnya IPM dibandingkan dengan level nasional. Gambar 1 menunjukkan adanya perbedaan persentase tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antar provinsi. Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. IPM pada kedua provinsi tersebut merupakan IPM terendah di Indonesia pada tahun 2016, hal ini dapat dilihat pada Lampiran 1. Keadaan ini mengindikasikan bahwa tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal belum tercapai secara optimal di beberapa daerah.

Pendapatan yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk menunjang pembangunan daerah. Salah satunya dimanfaatkan untuk melakukan belanja modal. Tingkat pengeluaran untuk belanja modal cukup tinggi, seperti digunakan untuk belanja lahan, mesin, bangunan dan lain-lain. Besarnya pengeluaran belanja modal, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian maupun pembangunan daerah. Rata-rata persentase belanja modal mencapai 20,16 persen dari total belanja daerah tiap provinsi. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu daerah yang menggunakan belanjanya untuk belanja modal dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata belanja modal tiap provinsi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pulau Papua mampu meningkatkan perekonomian yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 berturut turut sebesar 4,15 persen dan 7,47 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bird dan Vaillancourt, 1998). Namun, keadaan di Pulau Papua tidak

diiringi dengan tuntasnya permasalahan pembangunan lainnya, sehingga tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi serta rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kebijakan desentralisasi fiskal, kinerja ekonomi terhadap indikator pembangunan, khususnya untuk wilayah di pulau Papua. Adanya variabel yang tidak dapat diukur secara langsung yaitu desentralisasi fiskal dan indikator pembangunan, maka digunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2002), dengan menggunakan pendekatan desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan dan pengeluaran, menunjukkan ada hubungan signifikan positif antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Jian Chu dan Xiao-Ping Zheng (2013) dengan menggunakan data di 31 provinsi di China menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi karena adanya modal fisik, tenaga kerja, dan modal manusia. Selain itu juga, pada penelitian Fadli (2014) terdapat pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan. Penelitian yang hampir sama untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi dilakukan dengan metode *Partial Least Square – Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) dilakukan oleh Louis Chih-huang Liu (2017). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian, desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan dan kinerja keuangan terhadap kinerja perekonomian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hipotesis penelitian ini adalah (1) desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi, (2) desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap indikator pembangunan, (3) Kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indikator pembangunan.

METODOLOGI

Komponen dari indikator pembangunan berupa tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian Suwandi dan Waroka (2013) serta Hadi Sasana (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh secara tidak langsung dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran, sehingga desentralisasi fiskal penting untuk diterapkan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang ataupun sekelompok orang dengan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sisi makanan dan non makanan (BPS, 2018). Besarnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok memengaruhi kemampuan seseorang untuk hidup di atas standar hidup rata-rata. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Teori Kuznet menyatakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dengan kurva U terbalik.. Ketimpangan distribusi pendapatan dihitung dengan Indeks Gini. Distribusi pendapatan yang diharapkan adalah keadaan distribusi pendapatan yang merata. Ketimpangan rendah didapatkan pada awal pertumbuhan ekonomi dan pada puncak pertumbuhan ekonomi atau keadaan suatu negara mencapai kesejahteraan. Terdapat titik dimana pada pendapatan per kapita tertentu mencapai ketimpangan maksimal. Keadaan yang terjadi ini dikarenakan adanya perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau dikenal dengan teori Lewis. Produktivitas tenaga kerja menjadi faktor utama dalam proses perubahan struktural Todaro dan Smith (2003).

Adanya hubungan yang ambigu antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada pertumbuhan ekonomi rendah,

ketimpangan juga rendah, hal ini sejalan dengan teori Kuznet. Saat mempertahankan ketimpangan pendapatan pada tingkat rendah, pertumbuhan ekonomi juga rendah, hal ini dapat meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi, akan tetapi tingkat ketimpangan pendapatan dapat dikontrol dengan pertumbuhan ekonomi apabila tingkat kesempatan kerja dan produktivitas suatu negara meningkat. Kesempatan kerja yang tinggi dapat memberikan akses untuk masyarakat mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga diperlukan suatu kebijakan yang memihak masyarakat miskin, agar perubahan struktur tidak memperparah kondisi masyarakat miskin (Todaro dan Smith, 2003).

Oates (1993) menyatakan bahwa adanya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian pendapatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian Hariadi (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah yang efektif dan efisien mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan sehingga taraf kualitas manusia semakin meningkat. Terdapat hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga memiliki hubungan yang positif (Suwandi dan Waroka, 2013).

Metode Analisis

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis menggunakan analisis deskriptif berupa tabel, grafik, dan analisis tipologi klassen. Analisis tipologi klassen digunakan untuk melihat pola pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sehingga dapat mengklasifikasikan daerah

menjadi empat kategori yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tetapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah tertinggal. Selain itu, analisis inferensia yang digunakan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, kinerja ekonomi terhadap indikator pembangunan, menggunakan analisis *Partial Least Square – Structural Equation Modelling* (PLS-SEM). Pengukuran pada variabel laten desentralisasi fiskal adalah (1) derajat pembangunan yaitu rasio antara belanja modal dengan total belanja daerah, (2) derajat kemandirian yaitu rasio antara PAD dengan total belanja daerah, dan derajat ketergantungan yang diukur dari rasio antara PAD dengan DAU. Variabel kinerja ekonomi diukur dengan pendapatan perkapita, sementara itu variabel indikator pembangunan diukur dengan tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan IPM. Langkah-langkah dalam melakukan analisis PLS-SEM dengan software adalah sebagai berikut:

1. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau inner model merupakan model persamaan simultan yang menggambarkan hubungan antara variabel laten yang akan dilakukan evaluasi (Ghozali, 2014). Variabel laten yang digunakan adalah desentralisasi fiskal, kinerja ekonomi, dan indikator pembangunan. Variabel laten yang berperan sebagai variabel eksogen adalah variabel desentralisasi fiskal, untuk variabel endogen adalah kinerja ekonomi dan indikator pembangunan.

2. Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

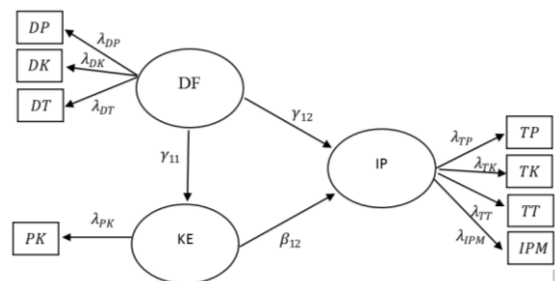
Model pengukuran atau outer model merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur signifikansi hubungan antara indikator yang teramati/dapat diukur dengan variabel laten yang disusun (Ghozali, 2014). Sehingga pada persamaan ini dilihat hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Pada penelitian ini model pengukuran yang digunakan adalah model reflektif. Pengukuran variabel laten desentralisasi fiskal didasarkan pada (1) derajat pembangunan; (2) derajat

kemandirian; dan (3) derajat ketergantungan. Pengukuran kinerja ekonomi menggunakan nilai pendapatan per kapita. Indikator pembangunan dalam penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu (1) tingkat kemiskinan; (2) tingkat ketimpangan; (3) tingkat pengangguran; dan (4) IPM.

3. Mengkonstruksi diagram jalur

Berdasarkan hubungan antara variabel laten dan hubungan antara variabel laten dengan indikator, maka diagram jalur yang menggambarkan model pada penelitian ini adalah seperti disajikan pada Gambar 2.

4. Mengkonstruksi diagram jalur ke sistem persamaan dan estimasi



Gambar 2. Diagram Jalur hubungan antara variabel dan indikator pada model PLS-SEM

Keterangan:

- DF: Desentralisasi Fiskal
- KE: Kinerja Ekonomi
- IP: Indikator Pembangunan
- DP: Derajat Pembangunan
- DK: Derajat Kemandirian
- DT: Derajat Ketergantungan
- PK: Pendapatan per Kapita
- TP: Tingkat Pengangguran
- TK: Tingkat Kemiskinan
- TT: Tingkat Ketimpangan
- IPM: Indeks Pembangunan Manusia

Outer model/model pengukuran yg digunakan adalah model reflektif.

Inner model/model struktural, hubungan antara variabel laten pada model struktural dapat dinyatakan dalam sistem persamaan berikut:

a. Variabel laten desentralisasi fiskal

$$DP = \lambda_{DP}DF + \varepsilon_1 \quad (1)$$

$$DK = \lambda_{DK}DF + \varepsilon_2 \quad (2)$$

$$DT = \lambda_{DT}DF + \varepsilon_3 \quad (3)$$

b. Variabel laten kinerja ekonomi

$$PK = \lambda_{PK}KE + \varepsilon_4 \quad (4)$$

c. Variabel laten indikator pembangunan

$$TP = \lambda_{TP}IP + \varepsilon_5 \quad (5)$$

$$TK = \lambda_{TK}IP + \varepsilon_6 \quad (6)$$

$$TT = \lambda_{TT}IP + \varepsilon_7 \quad (7)$$

$$IPM = \lambda_{IPM}IP + \varepsilon_8 \quad (8)$$

$$KE = \gamma_{11}DF + \zeta_1 \quad (9)$$

$$\gamma_{12}DF + \beta_{12}KE + \zeta_2 \quad (10)$$

Evaluasi *outer model* pada model pengukuran reflektif, dilakukan pada jenis model pengukuran reflektif antara lain *Convergen validity*, *Discriminant validity* dan *Composite reliability*. Evaluasi yang dilakukan pada model struktural antara lain Estimasi koefisien jalur, *Varian explanation of endogenous construct* (R^2) dan Pengujian kecocokan model dengan Q^2 . Hipotesis statistik untuk *inner model*, pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen adalah:

a. Pengaruh desentralisasi fiskal dengan kinerja ekonomi

$H_0: \gamma_i = 0$ (desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi)

$H_1: \gamma_i \neq 0$ (desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi)

b. Pengaruh desentralisasi fiskal dengan indikator pembangunan

$H_0: \gamma_i = 0$ (desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap indikator pembangunan)

$H_1: \gamma_i \neq 0$ (desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap indikator pembangunan)

Hipotesis statistik untuk *inner model*, pengaruh variabel laten endogen terhadap variabel laten endogen lainnya adalah:

$H_0: \beta_i = 0$ (kinerja ekonomi tidak berpengaruh terhadap indikator pembangunan)

$H_1: \beta_i \neq 0$ (kinerja ekonomi berpengaruh terhadap indikator pembangunan)

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS. Data yang digunakan antara lain adalah pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, IPM, PAD, DAU, belanja modal dan total belanja daerah. Data yang digunakan pada analisis deskriptif adalah data pada tingkat

kabupaten kota pada tahun 2010-2015 dengan 40 kabupaten/kota, sementara itu data untuk membentuk model pada analisis inferensia adalah tahun 2014 dan 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

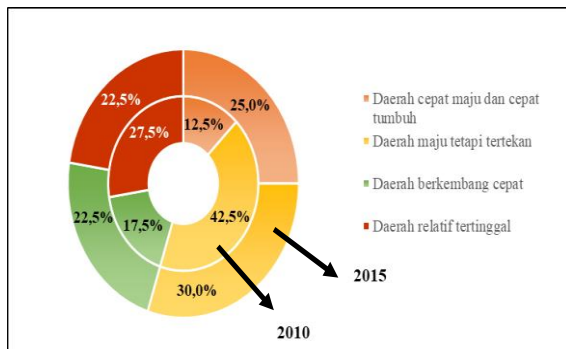
Gambaran Umum Kinerja Ekonomi, Indikator Pembangunan dan Desentralisasi Fiskal di Pulau Papua

Kinerja Ekonomi

Rata-rata pendapatan perkapita kabupaten kota di Pulau Papua dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan. Kabupaten Mimika, Teluk Bintuni, dan Sorong merupakan daerah yang memiliki pendapatan perkapita jauh lebih tinggi dari daerah yang lain. Perekonomian ketiga daerah tersebut didominasi oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan. Pendapatan di Kabupaten Mimika sebagian besar berasal dari pertambangan yaitu sebesar 80 persen dari total PDRB. Jenis pertambangan yang ada di daerah tersebut antara lain emas, perak dan tembaga. Salah satu perusahaan yang memiliki kontribusi besar adalah PT. Freeport. Keadaan di Kabupaten Sorong didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu lebih dari 50 persen. Pada tahun 2016, Sorong ditetapkan sebagai wilayah untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sementara itu, distribusi pendapatan di Teluk Bintuni sektor pertambangan sebesar 40 persen dan industri pengolahan sebesar 50 persen. Pendapatan perkapita yang selalu berada pada tingkat terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak. Perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Jenis peternakan yang digemari adalah jenis sapi potong, ayam, babi dan kambing.

Klasifikasi daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dapat menggunakan analisis tipologi klassen (Gambar 3). Pada tahun 2010 dan 2015 terjadi perubahan pada klasifikasinya. Proporsi daerah cepat maju dan cepat tumbuh mengalami peningkatan dan daerah relatif tertinggal mengalami penurunan. Pada tahun 2010 dan 2015 didominasi oleh daerah maju tetapi

tertekan. Daerah ini memiliki pendapatan per kapita diatas rata-rata pendapatan keseluruhan kabupaten namun, pertumbuhan ekonomi berada dibawah rata-rata. Sektor utama Pulau Papua didominasi sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Pada sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2010-2015 cenderung mengalami penurunan dan pada industri pengolahan cenderung konstan.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3. Persentase kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi menurut analisis tipologi kelas di Pulau Papua tahun 2010 dan 2015

Indikator Pembangunan

Setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat diharapkan mampu meningkatkan pembangunan didaerahnya baik pembangunan sosial maupun ekonomi. Pembangunan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan. Indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan suatu daerah antara lain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan dan IPM.

Kota Sorong memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Perbedaan tingkat pengangguran tertinggi dan terendah sangat jauh. Rata-rata tertinggi diantara kurun waktu 2010-2015 adalah pada tahun 2014. Tingkat pengangguran tertinggi mencapai 19,20 persen sementara itu terdapat daerah lain yang memiliki penduduk yang menganggur dengan jumlah yang sedikit. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota Sorong,

sedangkan tingkat terendahnya adalah Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Intan Jaya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Intan Jaya lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Sorong, sehingga jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja di Kota Sorong lebih sedikit. Semakin tinggi nilai TPAK maka tingkat kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi.

Tidak hanya pengangguran, tingkat kemiskinan di Pulau Papua sangat memprihatinkan, dimana rata-rata kemiskinan di Pulau Papua pada tahun 2015 mencapai 29,37 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 11,13 persen. Perbedaan yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak penduduk di Pulau Papua yang hidup tidak layak.

Tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Deiyai dan terendah adalah Kabupaten Merauke. Tingkat kemiskinan yang tinggi menggambarkan keadaan penduduk yang hidup serba kekurangan dan susah untuk memenuhi kebutuhan dasar karena memiliki pendapatan yang rendah. Kota Sorong mengalami peningkatan kemiskinan dari tahun 2010 ke 2015, sedangkan daerah lainnya mengalami penurunan. Keadaan perekonomian pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan, namun tingkat pengangguran yang ada juga mengalami peningkatan. Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Sorong diakibatkan karena adanya peningkatan pengangguran dan tingginya rasio ketergantungan penduduk.

Tingkat ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari nilai indeks Gini yang menunjukkan tingkat distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah. Tingkat ketimpangan tertinggi di Pulau Papua pada tahun 2015 sebesar 0,47 yaitu di Kabupaten Manokwari dan terendah sebesar 0,14 di Yalimo. Tahun 2015 merupakan merupakan waktu dimana tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Manokwari mencapai tingkat tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya.

Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja sebesar 47,57 persen dan penduduk miskin yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan disektor formal. Pendapatan di sektor informal cenderung rendah. Sementara itu tingkat pendapatan perkapita di Manokwari cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Pendapatan perkapita dan kemiskinan yang tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan yang ada dinikmati oleh penduduk golongan atas atau yang memiliki pendapatan yang tinggi. Keadaan sebaliknya ditunjukkan pada Kabupaten Yalimo yang memiliki pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang rendah.

Alat ukur lain yang dapat menggambarkan pembangunan adalah tingkat kesejahteraan yang dilihat dari nilai IPM (UNDP, 2016). Pada kurun waktu 2010-2015, nilai IPM di kabupaten/kota di Pulau Papua cenderung mengalami peningkatan. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Pulau Papua. Kebijakan yang mendukung adanya peningkatan kesejahteraan seperti pembangunan infrastruktur berupa trans-Papua, pelabuhan dan bandara di beberapa tempat. Kesejahteraan tertinggi berada di Kota Jayapura yang memiliki infrastruktur yang memadai, PDRB yang cukup tinggi dan akses antar daerah yang lebih mudah. Sementara itu, Kabupaten Nduga memiliki tingkat IPM terendah, dimana level IPM di Nduga memiliki perbedaan yang cukup jauh dibandingkan dengan daerah yang lain. Rata-rata IPM di Pulau Papua sebesar 56,26, sedangkan Kabupaten Nduga hanya 25,47. Tingginya perbedaan IPM menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk sangat rendah. Hal dapat disebabkan oleh seringnya terjadi perang antar suku yang dipicu oleh berbagai penyebab. Selain itu, keadaan infrastruktur masih sangat minim dalam menunjang perekonomian maupun kesejahteraan. Pada tahun 2015, Kabupaten Nduga belum memiliki rumah sakit. Fasilitas kesehatan juga masih minim, yaitu berupa puskesmas dengan jumlah 8 unit dan terdapat 11 dokter

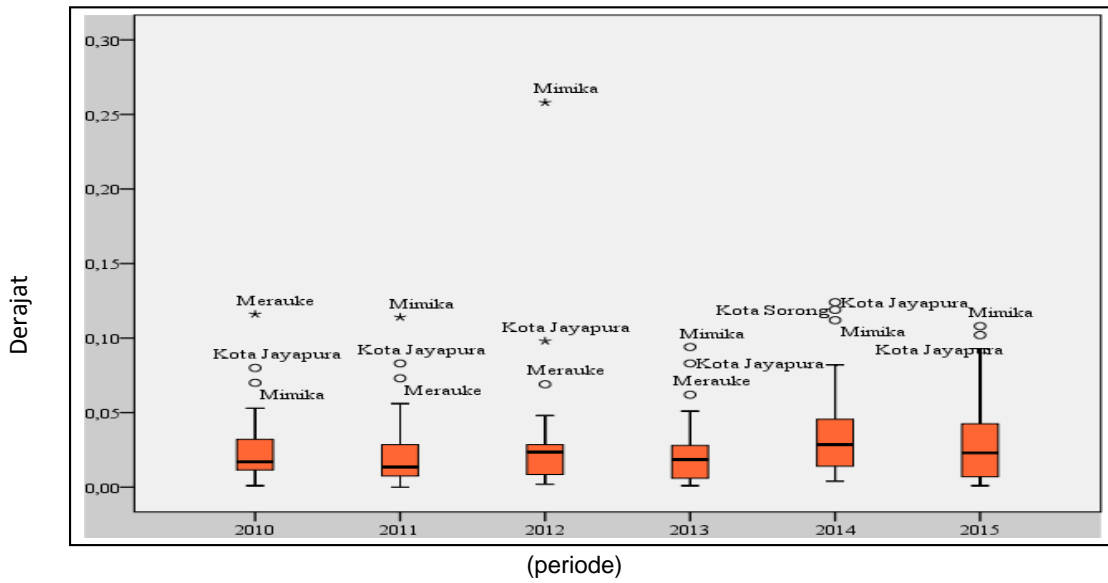
umum. Selain fasilitas kesehatan, jumlah sekolah yang ada juga sedikit. Terdapat 22 sekolah dasar, 56 sekolah menengah pertama dan 1 sekolah menengah atas. Akses antar daerah maupun akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan masih susah, sehingga penduduk banyak yang tidak melanjutkan sekolah dan jarang mendapatkan perawatan maupun pemeriksaan saat sakit.

Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kebebasan terhadap daerah untuk mengatur dan mengoptimalkan potensi yang ada didaerahnya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Pada tahun 2015, sebesar 66 persen dari belanja daerah digunakan untuk belanja langsung dan 34 persen untuk belanja tidak langsung (BPS 2017, diolah). Peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah lebih ditunjang dari belanja langsung terutama belanja modal. Rata-rata derajat pembangunan dari tahun 2010-2015 cenderung konstan. Derajat pembangunan yang tinggi pada tahun 2015 terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dan Nduga. Teluk Bintuni merupakan daerah pertambangan yang memiliki PAD yang tinggi, sehingga daerah tersebut mampu melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang perekonomiannya.

Kabupaten Nduga merupakan daerah yang memiliki tingkat pembangunan yang kurang baik. Keadaan tahun 2015 di Kabupaten Nduga berada pada tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita yang berada dibawah rata-rata dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi. Penggunaan belanja modal diharapkan dapat menunjang Kabupaten Nduga menjadi daerah yang lebih baik. Pembangunan fasilitas umum lebih ditingkatkan seperti pembangunan rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Belanja modal yang dikeluarkan tidak memberikan efek langsung, sehingga derajat pembangunan yang tinggi pada tahun 2015 belum

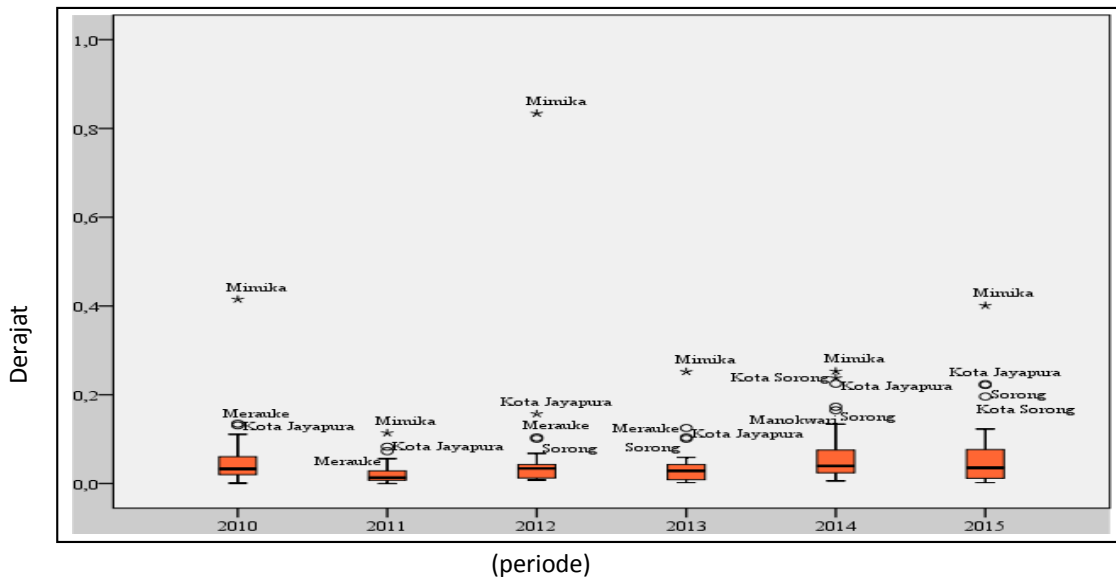
memberikan dampak pada tingkat pembangunan di tahun 2015.



Ukuran Statistik	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah kabupaten/kota	40	40	40	40	40	40
Rata-rata	0,024	0,023	0,029	0,021	0,036	0,030
Nilai minimum	0,001	0,000	0,002	0,001	0,004	0,001
Nilai maksimum	0,116	0,114	0,258	0,094	0,124	0,108

Sumber: BPS 2017, diolah

Gambar 4. Derajat kemandirian kabupaten/kota di Pulau Papua tahun 2010-2015



Ukuran Statistik	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah kabupaten/kota	40	40	40	40	40	40
Rata-rata	0,051	0,023	0,056	0,026	0,064	0,064
Nilai minimum	0,001	0,000	0,008	0,002	0,006	0,002
Nilai maksimum	0,415	0,144	0,834	0,252	0,253	0,401

Sumber: BPS 2017, diolah

Gambar 5. Derajat ketergantungan kabupaten kota di Pulau Papua tahun 2010-2015

Derajat kemandirian dan derajat ketergantungan dari tahun 2010-2015 berfluktuatif (Gambar 4 dan Gambar 5). Rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2013. Daerah yang memiliki nilai derajat kemandirian dan derajat ketergantungan yang tinggi dan rendah hampir sama. Hal ini terjadi karena sebagian besar daerah bergantung pada pendapatan yang berasal dari pusat berupa DAU untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Keadaan daerah yang memiliki derajat kemandirian dan derajat ketergantungan yang tinggi merupakan daerah yang memiliki PAD tinggi. Kabupaten Mimika, Sorong, Jayapura, Kota Sorong dan Kota Jayapura merupakan daerah yang memiliki derajat tertinggi. Daerah tersebut memiliki potensi yang menjadi sumber pendapatan daerah. Kabupaten Mimika merupakan kabupaten dengan hasil tambang yang melimpah, sehingga daerah mendapatkan pajak dari kegiatan tersebut. Adanya pajak yang diberikan kepada daerah akan meningkatkan PAD yang diterima oleh daerah. Kota Sorong dan Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat perekonomian. Perekonomian daerah tersebut didominasi oleh industri pengolahan, sehingga adanya perusahaan yang dibangun di daerah tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja Ekonomi Terhadap Indikator Pembangunan di Pulau Papua

Evaluasi pada *outer model* digunakan untuk melakukan evaluasi pada indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten sehingga mendapatkan model yang *valid* dan reliabel. Pengujian yang dilakukan antara lain *convergen validity* dengan *loading factor* dan *Average Variance Extracted (AVE)*, *discriminant validity* dan *composite reliability*.

Loading factor menunjukkan besarnya kontribusi dari masing-masing indikator terhadap variabel laten (lihat lampiran 7). Berdasarkan hasil pengolahan pada SmartPLS, menunjukkan bahwa

semua indikator signifikan pada taraf 0,05 dan nilai mutlak dari *loading factor* lebih dari > 0,5. Sementara itu, ketiga variabel laten memiliki nilai AVE lebih dari 0,5, yang artinya bahwa instrumen valid dalam menjelaskan variabel latennya. Nilai *loading factor* dan AVE telah memenuhi syarat, sehingga instrumen yang ada pada model dapat digunakan untuk menjelaskan variabel latennya.

Tabel 1. Nilai *Average variance extracted (AVE)* dan *Composite Reability*

No.	Variabel Laten	Composite reability	AVE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Desentralisasi Fiskal	0,718	0,723
2.	Kinerja Ekonomi	0,722	0,683
3.	Indikator Pembangunan	1	1

Sumber: Hasil output di *software SmartPLS 3*

Pengujian *outer model* yang kedua adalah *discriminant validity*, hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian indikator dalam mengukur variabel laten. Pengujian ini dilakukan dengan melihat *cross loading* pada nilai *loading factor* pada saat mengukur variabel laten dibandingkan dengan nilai *loading factor* saat mengukur variabel laten yang lain dengan indikator yang sama. Hasil pengolahan menunjukkan *loading factor* yang terbesar pada tiap indikator terjadi saat menjelaskan variabel laten yang ada pada model. Hal ini menunjukkan bahwa *discriminant validity* pada semua indikator telah sesuai dalam mengukur variabel laten.

Evaluasi pada *outer model* juga melihat *internal consistency reliability* yang dievaluasi dari nilai *composite reliability*. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam melihat suatu konsep yang digunakan adalah reliabel. Alat ukur dikatakan reliabel apabila nilai *composite reliability (CR)* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2014). Pemilihan indikator yang digunakan disesuaikan dengan konsep dapat dikatakan reliabel dalam mengukur variabel laten.

Evaluasi pada *inner model* dilakukan dengan melihat nilai R^2 pada masing-masing variabel dependen dan nilai koefisien jalur (uji t) untuk melihat signifikansi antar variabel laten. Nilai R^2 menunjukkan baik tidaknya variabel laten dalam model. Nilai R^2 pada indikator pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja ekonomi dalam menjelaskan keragaman variabel dalam model. Sementara itu nilai Q^2 dilakukan untuk uji

predictive relevance yaitu melakukan validasi pada model, sehingga dapat melihat seberapa baik nilai yang dihasilkan oleh model dan estimasinya. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik variabel laten eksogen menjelaskan variabel laten endogen. Hasil pengolahan menunjukkan nilai Q^2 bernilai positif, sehingga model memiliki *predictive relevance* atau dapat dikatakan variabel laten eksogen telah sesuai untuk menjelaskan variabel laten endogen.

Tabel 2. Estimasi Jalur dan Signifikansi

Hubunga antar variabel laten	Koefisien Jalur	t-statistik	p-value	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Desentralisasi Fiskal => Kinerja Ekonomi	0,493	4,197	0,000	Signifikan
Desentralisasi Fiskal => Indikator Pembangunan	0,452	3,656	0,000	Signifikan
Kinerja Ekonomi => Indikator Pembangunan	0,494	4,749	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil Output di *software* SmartPLS 3

Persamaan 1

$$\text{Kinerja ekonomi} = 0,493 \text{ Desentralisasi Fiskal}^* \quad (11)$$

Dari persamaan (11) didapatkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan kinerja ekonomi. Semakin tinggi level desentralisasi fiskal, maka kinerja ekonomi daerah akan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan kurva *Keynesian* pada kurva IS-LM dan AD-AS menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan output. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan APBN yang merupakan pengeluaran pemerintah. Salah satu tujuan dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan desentralisasi fiskal untuk peningkatan perekonomian berhasil tercapai di Pulau Papua.

Komponen dari desentralisasi fiskal pada penelitian ini adalah (1) derajat pembangunan, derajat kemandirian, dan (3)

derajat ketergantungan. Hasil dari model yang dipilih mendapatkan bahwa (2) dan (3) memiliki kontribusi positif dan (1) kontribusi negatif terhadap desentralisasi fiskal. Semakin tinggi nilai (2) dan (3) maka level desentralisasi fiskal akan mengalami peningkatan dan juga sebaliknya, sedangkan pada indikator (1) menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu semakin tinggi nilainya maka menurunkan level desentralisasi fiskal. Hal ini dapat ditunjukkan pula dengan pola hubungan antara komponen desentralisasi fiskal dengan perekeonomian (Lampiran 7).

Berdasarkan alokasi DAU dari tahun 2014 hingga 2016, dapat dilihat bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Pulau Papua mengalami peningkatan (Lampiran 2). Tidak hanya DAU yang mengalami peningkatan, tetapi PAD juga mengalami peningkatan, namun tidak sebanyak wilayah yang mengalami peningkatan DAU. Peningkatan DAU dan PAD pada tiap daerah mengakibatkan PDRB dan pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016, kecuali Kabupaten Kaimana dan Kabupaten

Sorong yang mengalami penurunan pada pendapatan perkapita.

Belanja modal merupakan aset untuk jangka panjang, sehingga besarnya nilai belanja modal tidak langsung berpengaruh ditahun tersebut melainkan berpengaruh di tahun-tahun berikutnya yang diiringi dengan pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian, seperti pelatihan, penambahan lapangan kerja, dan lain-lain. Derajat pembangunan di Pulau Papua dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan (Lampiran 3). Keadaan serupa juga dialami oleh banyak kabupaten kota. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kontribusi derajat pembangunan terhadap desentralisasi fiskal adalah negatif.

Persamaan II (Indikator Pembangunan)

$$\text{Indikator pembangunan} = 0,452 \\ \text{Desentralisasi Fiskal}^* + 0,494 \text{ Kinerja} \\ \text{Ekonomi}^* \quad (12)$$

Persamaan (12) menunjukkan bahwa variabel desentralisasi dan kinerja ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap indikator pembangunan. Peningkatan level desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi mampu meningkatkan level pembangunan. Peningkatan kinerja ekonomi memiliki dampak yang lebih tinggi dibandingkan dengan desentralisasi fiskal sehingga peningkatan kinerja ekonomi lebih berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan. Pola antara desentralisasi fiskal dengan kinerja ekonomi lebih jelas dibandingkan dengan pola desentralisasi fiskal dengan indikator pembangunan. Oleh karena itu pengaruh kinerja ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan desentralisasi fiskal terhadap indikator pembangunan.

Indikator pembangunan terdiri dari tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, tingkat pengangguran dan IPM. Tingkat kemiskinan memiliki kontribusi negatif terhadap pembangunan, sedangkan indikator lainnya memiliki kontribusi positif dalam menjelaskan indikator pembangunan. Pada umumnya,

desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, dan tingkat pengangguran. Keadaan yang berbeda ditunjukkan pada penelitian ini yaitu tingkat pengangguran dan ketimpangan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengangguran dan ketimpangan, level pembangunan semakin baik.

Keadaan di Pulau Papua menunjukkan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan antar daerah. Menurut Teori Kuznet, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dengan kurva U terbalik. Pada awalnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan dan pada satu titik tertentu akan menurunkan ketimpangan. Jika dilihat dari Teori Kuznet, keadaan di Pulau Papua berada pada tahap awal, dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka distribusi pendapatan penduduknya semakin tidak merata. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2014) menyatakan bahwa pada daerah timur Indonesia terdapat hubungan yang positif antara PAD, pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai PAD maka ketimpangan tersebut akan semakin meningkat, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pengangguran juga memiliki hubungan yang positif. Keadaan ketenagakerjaan di Pulau Papua pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,22 persen. Tingginya nilai TPAK menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun keatas yang masuk sebagai angkatan kerja tinggi. Tingginya TPAK di Pulau Papua tidak diiringi dengan tingginya penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan bahwa laju TPAK pada tahun 2015 sebesar 1,03 persen, namun Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengalami penurunan sebesar 1,07 persen. Adanya ketidaksejalan antara TKK dan TPAK dapat mengakibatkan tingginya

pengangguran walaupun perekonomian daerah tersebut mengalami peningkatan. Selain itu, tingkat pendidikan di Pulau Papua tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 adalah 6,27 tahun (lulus SD) dan Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 70,83 persen. Todaro (2003) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dasar untuk membentuk kapabilitas manusia, sehingga seseorang memiliki ketrampilan yang mendalam sehingga dapat mencapai kehidupan yang memuaskan dan bahagia dari berbagai aspek. Oleh karena itu, pembangunan yang tinggi tidak secara langsung dapat menurunkan pengangguran.

Indikator pembangunan lainnya yaitu tingkat kemiskinan dan IPM memiliki hubungan yang sesuai dengan teori, dimana semakin tinggi kinerja ekonomi dan desentralisasi fiskal maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin dan menaikkan tingkat kesejahteraan manusia yang dilihat dari level IPM. Keadaan di Pulau Papua menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi dan IPM yang rendah, sehingga perlu peningkatan perekonomian, peningkatan pendapatan daerah, dan rencana jangka panjang yang lebih matang dalam melakukan belanja modal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah akan mempercepat pembangunan yang ada pada suatu daerah. Peningkatan desentralisasi fiskal dan kinerja perekonomian dapat meningkatkan pembangunan, namun juga diiringi oleh peningkatan ketimpangan dan pengangguran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Secara umum, tingkat kemiskinan dan pengangguran di kabupaten/kota di Pulau Papua tahun 2010-2015 mengalami penurunan, namun masih berada di atas level nasional. Tingkat ketimpangan dan IPM mengalami

keadaan yang lebih baik yaitu ketimpangan mengalami penurunan dan IPM mengalami peningkatan akan tetapi tidak lebih baik jika dibandingkan dengan level nasional.

2. Pada tahun 2010-2015 di Pulau Papua, keadaan kinerja keuangan yang dilihat dari derajat pembangunan memiliki nilai yang cenderung konstan, sedangkan derajat kemandirian dan derajat ketergantungan lebih berfluktuatif. Pada kurun waktu tersebut, rata-rata pendapatan per kapita cenderung mengalami peningkatan serta terjadi penurunan proporsi pada daerah relatif tertinggal serta daerah maju tetapi tertekan dari tahun 2010 ke 2015.
3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja ekonomi berupa pendapatan perkapita.
4. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi berpengaruh positif terhadap peningkatan indikator pembangunan.

Saran penelitian yang dapat disampaikan antara lain:

1. Penggunaan belanja modal harus diperhatikan lagi agar dapat tepat sasaran untuk jangka panjang dan sasaran yang dituju. Belanja modal dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur berupa fasilitas kesehatan dan juga pendidikan yang merata. Selain itu dapat digunakan untuk membangun akses antar daerah untuk mempermudah perekonomian maupun sarana-prasarana lainnya. Adanya peningkatan akses tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan tingkat pendidikan diiringi dengan peningkatan lapangan usaha dapat menurunkan tingkat pengangguran dan ketimpangan.
2. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan PAD dengan menggali potensi yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya dari hasil alam yang diunggulkan tetapi pemanfaatan dan pengembangan dari sektor lain. Dengan

hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

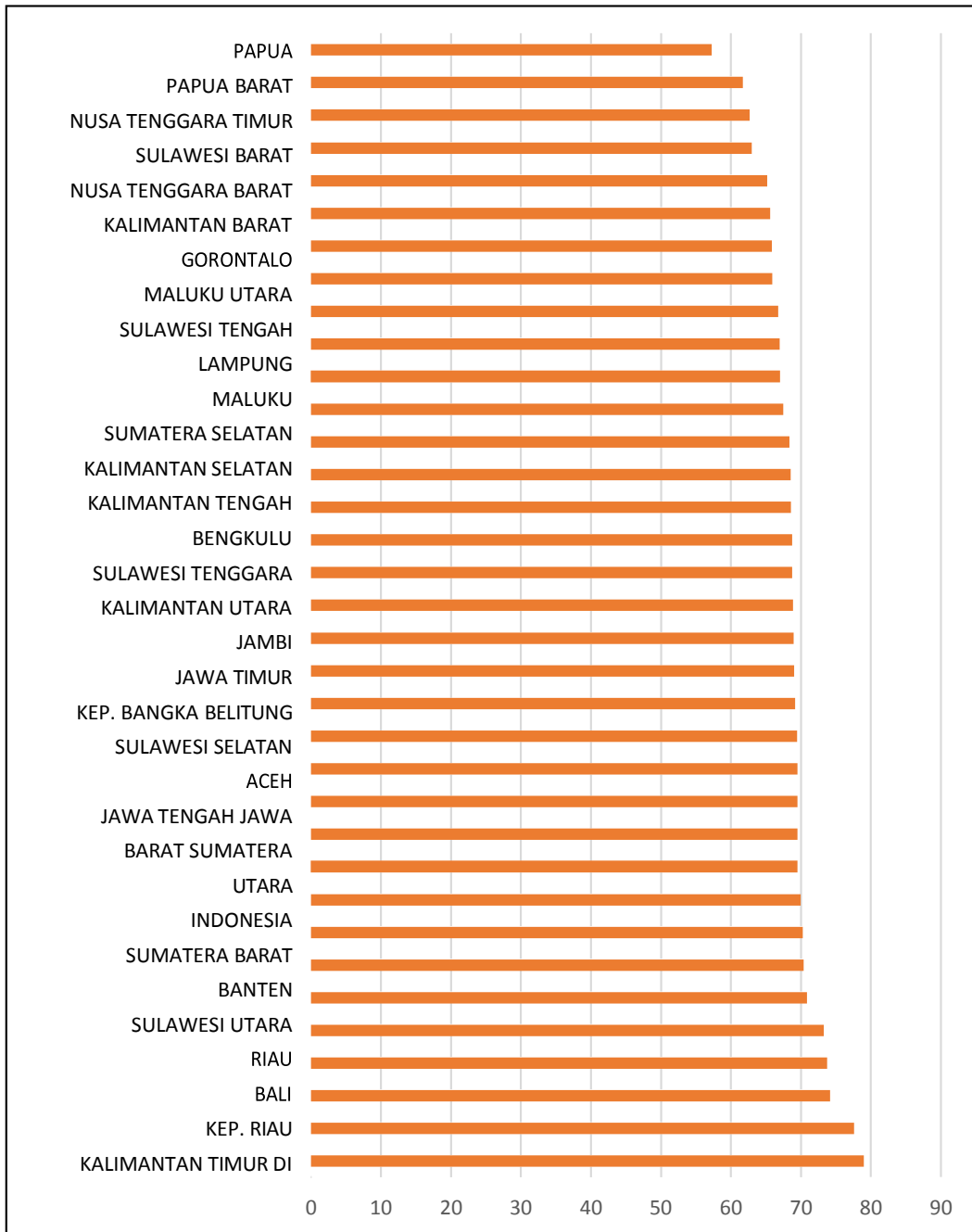
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat membentuk indeks desentralisasi fiskal dan indikator pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobou & Sakata, Masayo. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data for The United States*. Jepang: Academic press, Journal of Urban Economic 52 , 93-108.
- Bird, M Richaard & Vaillancourt, Francois. 1998. *Fiscal Decentralization in Developong Countries*. New York: Cambridge University Press.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2015-2016. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru. Jakarta: BPS.
- Chu, Jian dan Zheng, Xiao Ping. (2013). *China's Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth*. Jepang: *The Japanese Economic Review*
- Fadli, Faishal. 2014. *Analysis of Direct and indirect effect of fiscal desentralizatum and regional disparity (case study Provinces in east and west indiknesia year 2006-2012)*. Indonesia: Journal of economics and Sustainable development.
- Hariadi, Pramono. (2010). Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah: Trikonomika
- Ghozali, Imam. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) edisi 4*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Liu, Louis Chih-huang. 2017. *Fiscal Decentralization, Public Governemce, and Econoic Perfomance Examination of Two Pls-Sem Models*. Taiwan: *Taiwan Journal of Democracy*
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Macroeconomics Eighth Edition*. New York: Worth Publishers.
- Oates Wallace E. (1993). *Fiscal Desentralization and Ekonomik Development*. National Tax Journal 46, 237-243.
- Sasana, Hadi. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jawa Tengah: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).
- Suwandi dan Warokka, Ari. (2013). *Fiscal Decentralization and Special Local Autonomy: Evidence from an Emerging Market*. Indonesia: IBIMA Publishing (*Journal of Southeast Asian research*)
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2014. *Economic Development (12th edition)*. United States.

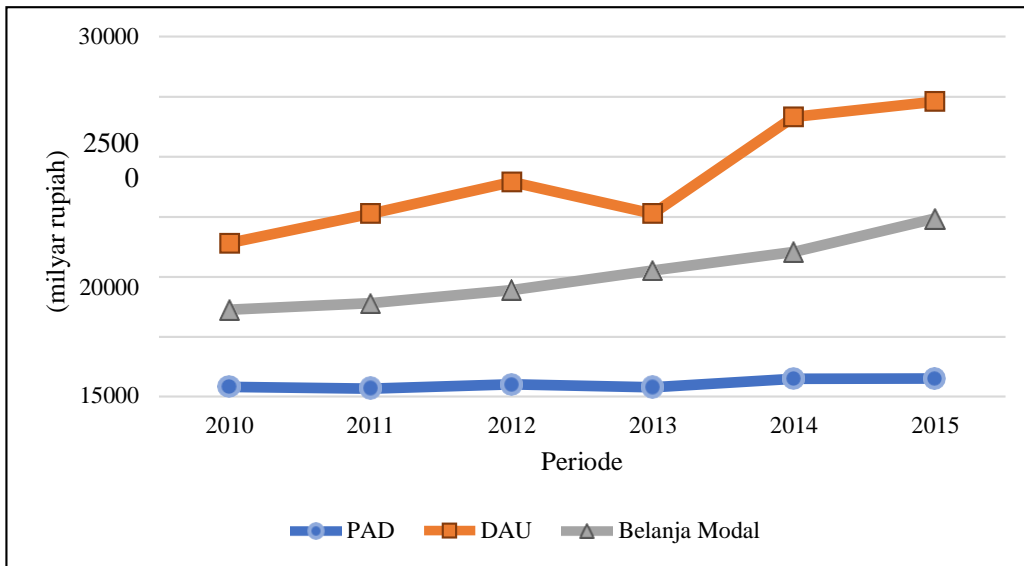
LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai IPM Provisi di Indonesia Tahun 2016



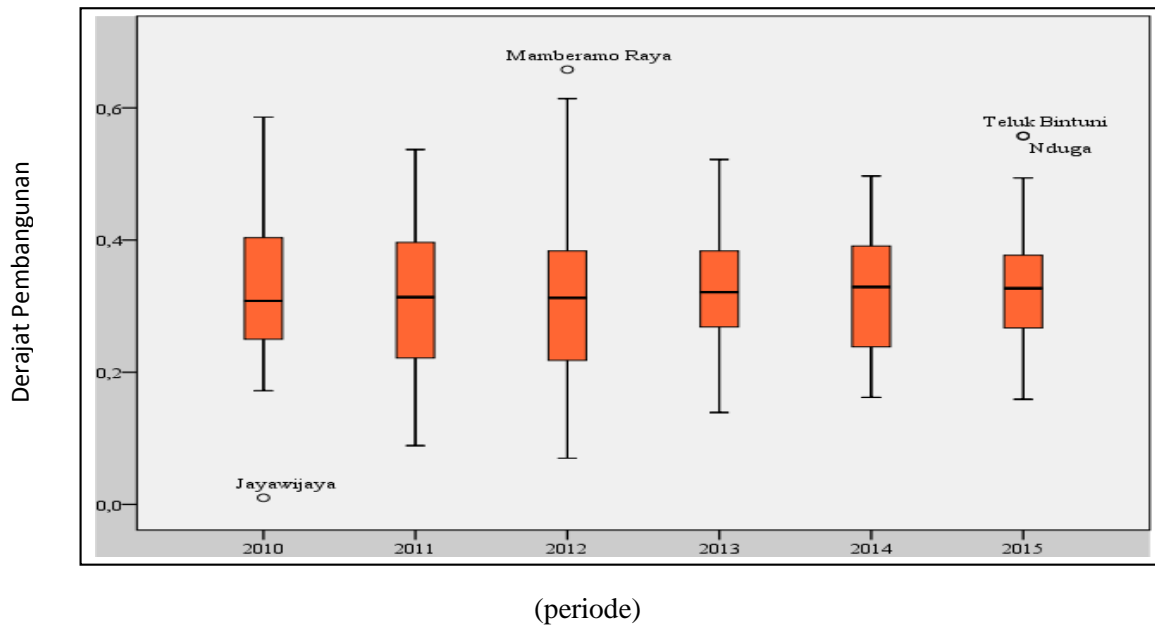
Sumber: BPS, 2017

Lampiran 2. Total nilai PAD, DAU dan belanja modal Pulau Papua tahun 2010-015 (dalam milyar rupiah)



Sumber: BPS 2017, diolah

Lampiran 3. Derajat pembangunan kabupaten/kota di Pulau Papua tahun 2010-2015



Ukuran Statistik	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah kabupaten/kota	40	40	40	40	40	40
Rata-rata	0,337	0,315	0,325	0,324	0,322	0,332
Nilai minimum	0,172	0,089	0,070	0,139	0,162	0,159
Nilai maksimum	0,586	0,537	0,658	0,522	0,497	0,558

Sumber: BPS 2017, diolah

Lampiran 4. Klasifikasi kabupaten kota Pulau Papua menurut tipologi kelas 2010

	Pendapatan perkapita > rata-rata pendapatan perkapita	Pendapatan perkapita ≤ rata-rata pendapatan perkapita																										
Pertumbuhan ekonomi > rata-rata pertumbuhan ekonomi	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh: 1. Jayapura 2. Teluk Bintuni 3. Sorong 4. Kota Jayapura	Daerah berkembang cepat:																										
		<table border="0"> <tr> <td>1. Merauke</td> <td>15. Nduga</td> </tr> <tr> <td>2. Jayawijaya</td> <td>16. Lanny Jaya</td> </tr> <tr> <td>3. Nabire</td> <td>17. Mamberamo</td> </tr> <tr> <td>4. Biak Numfor</td> <td>18. Tengah</td> </tr> <tr> <td>5. Boven Digoel</td> <td>19. Yalimo</td> </tr> <tr> <td>6. Mappi</td> <td>20. Puncak</td> </tr> <tr> <td>7. Asmat</td> <td>21. Dogiyai</td> </tr> <tr> <td>8. Yahukimo</td> <td>22. Intan Jaya</td> </tr> <tr> <td>9. Pegunungan Bintang</td> <td>23. Deiyai</td> </tr> <tr> <td>10. Tolikara</td> <td>24. Fakfak</td> </tr> <tr> <td>11. Sarmi</td> <td>25. Kaimana</td> </tr> <tr> <td>12. Keerom</td> <td>26. Manokwari</td> </tr> <tr> <td>13. Warpen</td> <td>27. Kota Sorong</td> </tr> <tr> <td>14. Mamberamo Raya</td> <td></td> </tr> </table>	1. Merauke	15. Nduga	2. Jayawijaya	16. Lanny Jaya	3. Nabire	17. Mamberamo	4. Biak Numfor	18. Tengah	5. Boven Digoel	19. Yalimo	6. Mappi	20. Puncak	7. Asmat	21. Dogiyai	8. Yahukimo	22. Intan Jaya	9. Pegunungan Bintang	23. Deiyai	10. Tolikara	24. Fakfak	11. Sarmi	25. Kaimana	12. Keerom	26. Manokwari	13. Warpen	27. Kota Sorong
1. Merauke	15. Nduga																											
2. Jayawijaya	16. Lanny Jaya																											
3. Nabire	17. Mamberamo																											
4. Biak Numfor	18. Tengah																											
5. Boven Digoel	19. Yalimo																											
6. Mappi	20. Puncak																											
7. Asmat	21. Dogiyai																											
8. Yahukimo	22. Intan Jaya																											
9. Pegunungan Bintang	23. Deiyai																											
10. Tolikara	24. Fakfak																											
11. Sarmi	25. Kaimana																											
12. Keerom	26. Manokwari																											
13. Warpen	27. Kota Sorong																											
14. Mamberamo Raya																												
Pertumbuhan ekonomi ≤ rata-rata pertumbuhan ekonomi	Daerah maju tetapi tertekan: 1. Mimika 2. Raja Ampat	Daerah relatif tertinggal: 1. Kepulauan Yapen 2. Paniai 3. Puncak Jaya 4. Sapor 5. Teluk Wodama 6. Sorong Selatan 7. Tabarauw 8. Maybat																										

Sumber: BPS, diolah

Lampiran 5. Klasifikasi kabupaten/kota Pulau Papua menurut tipologi kelas 2015

	Pendapatan perkapita > rata-rata pendapatan perkapita	Pendapatan perkapita ≤ rata-rata pendapatan perkapita																
Pertumbuhan ekonomi > rata-rata pertumbuhan ekonomi	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh: 1. Jayapura 2. Nabire 3. Kota Jayapura	Daerah berkembang cepat:																
		<table border="0"> <tr> <td>1. Merauke</td> <td>10. Yalimo</td> </tr> <tr> <td>2. Paniai</td> <td>11. Puncak</td> </tr> <tr> <td>3. Puncak Jaya</td> <td>12. Dogiyai</td> </tr> <tr> <td>4. Yahukimo</td> <td>13. Intan Jaya</td> </tr> <tr> <td>5. Sarmi</td> <td>14. Deiyai</td> </tr> <tr> <td>6. Keerom</td> <td>15. Fakfak</td> </tr> <tr> <td>7. Waropen</td> <td>16. Manokwari</td> </tr> <tr> <td>8. Mamberamo Raya</td> <td>17. Kota Sorong</td> </tr> <tr> <td>9. Lanny Jaya</td> <td></td> </tr> </table>	1. Merauke	10. Yalimo	2. Paniai	11. Puncak	3. Puncak Jaya	12. Dogiyai	4. Yahukimo	13. Intan Jaya	5. Sarmi	14. Deiyai	6. Keerom	15. Fakfak	7. Waropen	16. Manokwari	8. Mamberamo Raya	17. Kota Sorong
1. Merauke	10. Yalimo																	
2. Paniai	11. Puncak																	
3. Puncak Jaya	12. Dogiyai																	
4. Yahukimo	13. Intan Jaya																	
5. Sarmi	14. Deiyai																	
6. Keerom	15. Fakfak																	
7. Waropen	16. Manokwari																	
8. Mamberamo Raya	17. Kota Sorong																	
9. Lanny Jaya																		
Pertumbuhan ekonomi ≤ rata-rata pertumbuhan ekonomi	Daerah maju tetapi tertekan: 1. Mimika 2. Boven Digoel 3. Teluk Bintuni 4. Sorong 5. Raja Ampat	Daerah relatif tertinggal: 1. Jayawijaya 2. Kepulauan Yapen 3. Biak Numfor 4. Mappi 5. Asmat 6. Pegunungan Bintang 7. Tolikara 8. Supiori 9. Nduga 10. Mambero Tengah 11. Kaimana 12. Teluk Wodama 13. Sorong Selatan 14. Tambrau 15. Maybat 16. Manokwari Selatan 17. Pegunungan Arfak																

Sumber: BPS, diolah

Lampiran 6. Nilai *loading factor*

No.	Variabel Laten	Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Desentralisasi fiskal	Derajat Pembangunan	-0,505	0,002	Dipertahankan
		Derajat Kemandirian	0,979	0,000	<i>Valid</i>
		Derajat Ketergantungan	0,978	0,000	<i>Valid</i>
2.	Kinerja Ekonomi	LN(Pendapatan perkapita)	1		
3.	Indikator pembangunan	Tingkat Kemiskinan	-0,805	0,000	<i>Valid</i>
		Tingkat Ketimpangan	0,721	0,000	<i>Valid</i>
		Tingkat Pengangguran	0,852	0,000	<i>Valid</i>
		IPM	0,932	0,000	<i>Valid</i>

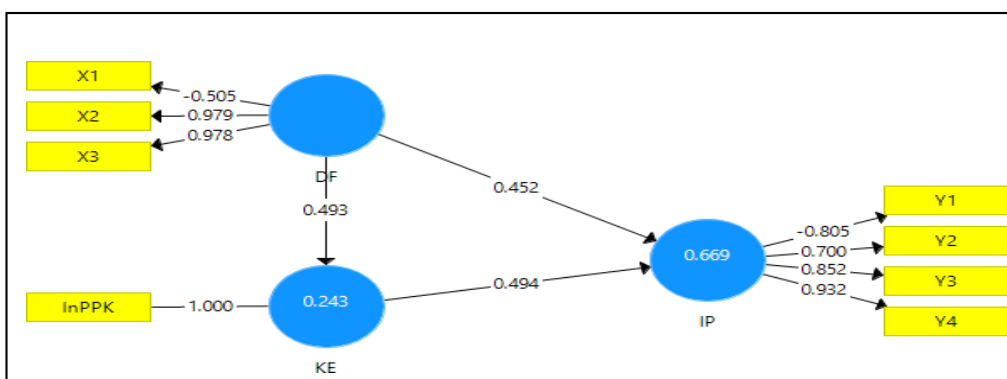
Sumber: Hasil output di *software SmartPLS 3*

Lampiran 7. Nilai *Cross Loading*

Indikator	Desentralisasi Fiskal	Kinerja Ekonomi	Indikator pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
Derajat Pembangunan	-0,505	0,006	-0,334
Derajat Kemandirian	0,979	0,493	0,707
Derajat Ketergantungan	0,978	0,555	0,658
Ln Pendapatan perkapita	0,493	1	0,717
Tingkat Kemiskinan	-0,544	-0,548	-0,805
Tingkat Ketimpangan	0,443	0,520	0,700
Tingkat Pengangguran	0,641	0,603	0,852
IPM	0,648	0,686	0,932

Sumber: Hasil OUTPUT di *software SmartPLS 3*

Lampiran 8. Hasil estimasi model PLS-SEM 3



Keterangan:

- | | | | |
|-------|---|----|------------------------|
| X1 | : Derajat pembangunan | Y1 | : Tingkat kemiskinan |
| X2 | : Derajat kemandirian | Y2 | : Tingkat ketimpangan |
| X3 | : Derajat ketegantungan | Y3 | : Tingkat pengangguran |
| lnPPK | : logaritma natural dari pendapatan perkapita | Y4 | : IPM |